



Dinamika Politik dan Militer di Indonesia dalam Konteks Pemberontakan dan Peralihan Kekuasaan (1946-1965)

Ade Apandi✉, Ardhia Rachma Cahyani, Feriana Radika Sari, Raditya Lintang S

Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Disubmit: Januari
Direvisi: Februari
Diterima: Maret

Keywords:
Old Order, Cold War,
Military,
Dwifungsi ABRI

Abstrak

Penelitian ini membahas peran militer dalam politik Indonesia pada periode 1946–1965, dengan fokus pada pemikiran politik militer, latar belakang pemberontakan, serta respons militer terhadap kondisi darurat dan transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika internal, seperti pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, dan G30S/PKI, serta faktor eksternal, seperti tekanan geopolitik Perang Dingin. Militer memanfaatkan legitimasi sebagai penjaga stabilitas negara untuk mengintegrasikan peran mereka dalam ranah sipil dan politik, yang mencapai puncaknya pada awal Orde Baru. Selain itu, konsep Dwifungsi ABRI menjadi landasan ideologis bagi militer untuk berperan tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai aktor politik. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara militer dan politik di Indonesia, serta kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas negara di tengah gejolak domestik dan pengaruh global. Analisis ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang peran militer dalam konteks sejarah politik Indonesia dan relevansinya dalam dinamika politik kontemporer.

Abstract

This study examines the role of the military in Indonesian politics during the 1946–1965 period, focusing on military political thought, the background of rebellions, and the military's response to emergency conditions and the power transition from Soekarno to Soeharto. The findings reveal that the military's involvement in Indonesian politics was influenced by internal dynamics, including the DI/TII, PRRI/Permesta, and G30S/PKI rebellions, as well as external factors, such as the geopolitical pressures of the Cold War. The military utilized its legitimacy as the guardian of national stability to integrate its role into civilian and political domains, culminating in the early New Order era. Additionally, the Dwifungsi ABRI concept provided an ideological foundation for the military to act not only as a defense institution but also as a political actor. This research offers a comprehensive understanding of the interplay between the military and politics in Indonesia, highlighting their contribution to maintaining national stability amid domestic upheavals and global influences. The analysis aims to provide new perspectives on the military's role in Indonesia's political history and its relevance in contemporary political dynamics.

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara-negara pasca-kolonial, peran militer sering kali menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas politik. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang umumnya dihadapi negara-negara tersebut setelah merdeka, seperti lemahnya institusi pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi, serta konflik internal yang berkepanjangan. Militer sering kali dipandang sebagai institusi yang paling terorganisasi, memiliki kekuatan yang terpusat, dan mampu bertindak cepat untuk meredam ancaman terhadap negara, baik dari dalam maupun luar (Crouch, 2007).

Selain itu, militer di banyak negara pasca-kolonial juga sering merasa memiliki legitimasi untuk ikut campur dalam politik dengan alasan melindungi kedaulatan negara atau menyelamatkan bangsa dari ketidakmampuan pemerintahan sipil.¹ Dalam beberapa kasus, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga menjadi aktor politik yang aktif, bahkan mengambil alih kekuasaan saat situasi dianggap genting. Fenomena ini terlihat di berbagai negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, di mana militer sering memainkan peran ganda sebagai stabilisator dan dinamisator politik (Fattah, 2005).

Namun, keterlibatan militer dalam politik tidak selalu membawa dampak positif. Meski dalam jangka pendek dapat membantu mengatasi krisis tertentu, dominasi militer dalam politik sering kali mengabaikan prinsip demokrasi, membatasi kebebasan sipil, dan memperkuat otoritarianisme. Oleh karena itu, peran militer di negara pasca-kolonial menjadi salah satu topik yang sering dikaji dalam studi politik dan hubungan sipil-militer. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai ancaman internal yang serius, terutama dalam bentuk pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah. Ancaman-ancaman ini melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan ideologis, politik, atau agama yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Salah satu yang paling menonjol adalah pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia), seperti yang terjadi pada peristiwa Madiun 1948, di mana PKI berupaya

merebut kekuasaan dengan cara kekerasan. Selain itu, muncul gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang bertujuan mendirikan negara berbasis syariat Islam, dengan pusat-pusat pemberontakan di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan (Muhajir, 2016).

Di sisi lain, tantangan juga datang dari gerakan separatis seperti PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta), yang dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pusat dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya. Pemberontakan-pemberontakan ini tidak hanya mengancam stabilitas politik nasional tetapi juga memicu kondisi darurat perang di banyak wilayah. Pemerintah pusat, dengan dukungan militer, harus menghadapi situasi yang kompleks ini untuk menjaga keutuhan wilayah negara, yang sering kali melibatkan operasi militer skala besar dan kebijakan represif.

Keterlibatan aktif militer dalam politik sering kali dipicu oleh kelemahan pemerintahan sipil yang dianggap tidak mampu mengelola negara secara efektif. Dalam situasi seperti itu, militer sering kali melihat dirinya sebagai institusi yang paling terorganisasi, disiplin, dan siap untuk mengambil alih tanggung jawab dalam menjaga stabilitas nasional. Pemerintahan sipil yang lemah, misalnya karena kurangnya legitimasi, korupsi yang merajalela, atau ketidakmampuan menangani krisis, sering kali menciptakan ruang bagi militer untuk masuk ke dalam ranah politik dengan dalih menyelamatkan negara dari kekacauan (Ricklefs, 2008).

Pada era pasca-kolonial, khususnya di Indonesia pada masa Orde Lama, militer memanfaatkan kondisi ini untuk memperluas perannya, bukan hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam politik dan administrasi pemerintahan. Militer mulai memainkan peran ganda sebagai penegak keamanan dan aktor politik, mengambil langkah-langkah strategis untuk mengontrol situasi yang dinilai mengancam stabilitas nasional. Dalam praktiknya, tindakan ini sering disertai dengan pembenaran bahwa pemerintahan sipil tidak

memiliki kemampuan untuk menjaga keutuhan negara, sehingga keterlibatan militer dianggap sebagai upaya "penyelamatan." Namun, konsekuensi dari keterlibatan ini adalah terjadinya pergeseran kekuasaan, di mana supremasi sipil melemah dan militer menjadi aktor dominan dalam pengambilan keputusan politik.

Pemikiran politik militer di Indonesia pada masa Orde Lama mulai berkembang secara signifikan di bawah pengaruh tokoh seperti Jenderal A.H. Nasution. Salah satu gagasan yang menjadi dasar peran militer di ranah sipil adalah konsep "Dwifungsi ABRI", yang memberikan militer peran ganda: sebagai kekuatan pertahanan negara sekaligus sebagai kekuatan sosial-politik (Rikan, 2015). Gagasan ini muncul dari keyakinan bahwa militer tidak hanya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga memiliki tugas untuk terlibat dalam pembangunan bangsa dan pengelolaan pemerintahan (Crouch, 2007).

Menurut Nasution, militer tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat perang, tetapi juga harus berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik, terutama di tengah kondisi negara yang masih rawan akibat pemberontakan dan konflik internal. Dengan konsep ini, militer secara formal mendapatkan legitimasi untuk berpartisipasi dalam urusan politik, ekonomi, dan sosial. Dwifungsi ABRI dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketidakstabilan politik yang sering terjadi akibat lemahnya pemerintahan sipil saat itu (Herman, 2021).

Namun, konsep ini juga menimbulkan berbagai kontroversi. Di satu sisi, peran ganda militer dianggap mampu menciptakan stabilitas politik dan mengatasi kekosongan kepemimpinan. Di sisi lain, implementasi Dwifungsi ABRI sering kali mengaburkan batas antara kekuasaan militer dan sipil, sehingga memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan, pelemahan demokrasi, serta dominasi militer dalam pemerintahan yang berlanjut hingga era Orde Baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review) untuk mengeksplorasi peran militer dalam politik Indonesia selama periode 1946–1965. Fokus penelitian adalah memahami pemikiran politik militer dalam konteks nasional dan global berdasarkan teori yang relevan serta dokumen sejarah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep, teori, dan data sejarah yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk menghubungkan gagasan-gagasan dalam teori pemikiran politik militer dengan peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia dan pengaruh global pada masa tersebut. Sumber primer yang digunakan adalah dokumen resmi, serta kebijakan strategis terkait konsep Dwifungsi ABRI. Sumber sekunder yang digunakan berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang membahas teori "military guardianship", Dwifungsi ABRI, serta pengaruh Perang Dingin terhadap politik Indonesia. Seluruh bahan literatur yang relevan dikumpulkan, termasuk teori pemikiran politik militer, sejarah global, dan konteks politik dalam negeri Indonesia pada periode 1946–1965. Peneliti menelusuri kronologi peristiwa untuk memahami kaitan antara tekanan geopolitik global (seperti Perang Dingin dan tarik-menarik ideologi) dengan kebijakan militer di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, di mana penulis menggambarkan peristiwa politik dan kondisi sosial selama periode penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

Stabilitas Politik dan Penanganan Pemberontakan di Masa Orde Lama

Militer memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada bidang pertahanan negara dari ancaman eksternal, tetapi juga berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator politik. Sebagai stabilisator, militer bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri, terutama ketika terjadi ancaman terhadap stabilitas politik, seperti pemberontakan, konflik horizontal, atau kegagalan pemerintahan sipil dalam mengelola

situasi krisis (Irawan, 2016). Dengan peran ini, militer sering kali menjadi pihak yang mengambil langkah tegas untuk memastikan negara tetap berada dalam kondisi yang terkendali.

Sementara itu, sebagai dinamisator, militer juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan pengelolaan pemerintahan. Fungsi ini memungkinkan militer untuk ikut andil dalam pembangunan nasional, menciptakan kebijakan strategis, serta memengaruhi arah politik negara. Dalam praktiknya, peran dinamisator ini sering kali terlihat melalui keterlibatan militer dalam program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, dengan tujuan menciptakan perubahan yang dianggap mendukung stabilitas dan kemajuan negara (Huda, 2014).

Namun, perpaduan kedua fungsi ini membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, militer dapat membantu menjaga keutuhan negara saat pemerintahan sipil dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya. Di sisi lain, peran ganda ini juga dapat membuka peluang bagi dominasi militer dalam politik, yang berisiko melemahkan demokrasi dan kebebasan sipil. Jenderal A.H. Nasution merupakan salah satu tokoh militer terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam membentuk doktrin militer Indonesia, khususnya melalui gagasannya tentang "Perang Rakyat Semesta" dan "Dwifungsi ABRI" (Ahmad, 2023).

Konsep Perang Rakyat Semesta lahir dari pemikiran Nasution tentang pentingnya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Nasution, pertahanan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer semata, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep ini, kekuatan pertahanan nasional harus bersifat menyeluruh, melibatkan baik kekuatan militer formal (TNI) maupun potensi rakyat sebagai bagian dari strategi pertahanan terintegrasi. Strategi ini dianggap relevan mengingat Indonesia yang luas secara geografis dan memiliki keragaman sosial-politik, sehingga membutuhkan pendekatan yang kolaboratif

dalam menghadapi ancaman eksternal maupun internal.

Sebagai bagian dari implementasi doktrin ini, pada tahun 1958, Nasution memperkenalkan Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta), yang menekankan bahwa setiap warga negara berperan sebagai komponen cadangan dalam pertahanan. Misalnya, masyarakat dilibatkan dalam pelatihan militer dasar atau program ketahanan lokal. Hal ini bertujuan agar Indonesia memiliki pertahanan yang tangguh, di mana rakyat dan militer bersatu dalam menghadapi segala ancaman, baik pemberontakan internal seperti DI/TII maupun ancaman luar negeri (Sahajuddin, 2019).

Selain itu, Nasution juga mencetuskan gagasan Dwifungsi ABRI yang mulai diterapkan pada era Orde Lama dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Dwifungsi memberikan militer dua peran utama: sebagai kekuatan pertahanan negara dan sebagai kekuatan sosial-politik. Ide ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa militer tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek keamanan, tetapi juga harus terlibat aktif dalam pembangunan nasional, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan (Kamil, 2022). Dalam konteks ini, militer dianggap mampu mengisi kekosongan kepemimpinan sipil yang sering kali dianggap tidak stabil dan kurang kompeten.

Namun, konsep Dwifungsi ABRI menuai banyak kritik, terutama karena membuka jalan bagi dominasi militer dalam pemerintahan. Data menunjukkan bahwa selama masa Orde Baru (1966-1998), militer memiliki akses luas ke ranah politik, ekonomi, hingga sosial. Misalnya, sejumlah jabatan strategis seperti menteri, gubernur, dan bupati banyak diisi oleh perwira militer aktif. Pada Pemilu 1971, militer bahkan diberikan kursi khusus di parlemen melalui fraksi ABRI, yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh militer dalam politik. Secara keseluruhan, meskipun pemikiran Nasution tentang Perang Rakyat Semesta dan Dwifungsi ABRI memberikan kontribusi penting terhadap penguatan stabilitas negara pada masa awal kemerdekaan, implementasi gagasan ini juga

memunculkan dilema, terutama terkait hubungan sipil-militer dan penguatan demokrasi di Indonesia (Hilal, 2022). Peran militer dalam menata sistem pemerintahan pada era Orde Lama hingga Orde Baru sangat signifikan, terutama melalui kontrol terhadap lembaga-lembaga sipil. Hal ini dimulai dari keyakinan bahwa militer, sebagai institusi yang dianggap paling terorganisasi dan berdisiplin tinggi, mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh lemahnya pemerintahan sipil. Dalam konteks ini, militer tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan dan stabilitas, tetapi juga aktif dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan (Syahrul, 2020).

Pada masa Orde Lama, militer mulai terlibat secara aktif dalam berbagai lembaga pemerintahan sebagai bentuk penerapan konsep Dwifungsi ABRI. Fungsi ini memberikan legitimasi bagi militer untuk mengambil alih peran-peran strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah (Azwar, 2021). Misalnya, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, militer memainkan peran sentral dalam mengonsolidasikan kekuasaan negara dengan membentuk struktur yang memungkinkan mereka mengontrol lembaga-lembaga sipil seperti pemerintahan daerah dan birokrasi (Yuliarso, 2005).

Kontrol militer terhadap lembaga sipil semakin dominan pada era Orde Baru. Berdasarkan data dari *Military Reform in Indonesia* (Marcus Mietzner, 2006), pada tahun 1980-an, sekitar 65% dari jabatan gubernur dan 40% bupati di Indonesia dipegang oleh perwira militer aktif atau pensiunan militer. Hal ini menandakan bahwa lembaga-lembaga sipil seperti pemerintahan daerah sepenuhnya berada di bawah pengaruh militer.⁶ Selain itu, ABRI (sekarang TNI) memiliki kursi di parlemen melalui Fraksi ABRI, yang semakin memperkuat kontrol mereka terhadap pembuatan kebijakan publik.

Selain di tingkat struktural, kontrol militer juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang sifatnya represif. Militer tidak segan

menggunakan pendekatan koersif untuk menekan gerakan-gerakan protes masyarakat sipil yang dianggap dapat mengganggu stabilitas nasional. Contohnya adalah penanganan gerakan mahasiswa dan aktivis di tahun 1960-an hingga 1990-an, di mana lembaga-lembaga sipil yang kritis terhadap pemerintah sering kali menjadi target pengawasan militer.

Meskipun peran militer dalam menata sistem pemerintahan memberikan stabilitas dalam jangka pendek, dominasi mereka terhadap lembaga sipil menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya adalah melemahnya peran sipil dalam demokrasi, terbatasnya ruang bagi oposisi, dan munculnya korupsi struktural karena minimnya sistem checks and balances. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol militer terhadap lembaga sipil lebih bersifat sentralistik dan mengabaikan prinsip demokrasi (Rikan, 2015).

Ketegangan ideologi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi dinamika politik dan sosial di dalam negeri. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pandangan mendasar antara tiga kelompok besar, yaitu nasionalis, komunis, dan kelompok berbasis agama. Kelompok nasionalis, yang berfokus pada membangun identitas bangsa yang bersatu, sering kali bersinggungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengusung ideologi perjuangan kelas dan komunisme internasional.⁷ Di sisi lain, kelompok berbasis agama, seperti Masyumi dan NU, memiliki tujuan yang berbeda, yakni menekankan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara. Perbedaan ideologis ini menciptakan persaingan politik yang intens, bahkan sering kali berujung pada konflik terbuka. Salah satu contohnya adalah peristiwa Madiun 1948, di mana PKI melakukan pemberontakan, yang kemudian ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Jenderal Soedirman dan Jenderal Nasution (Herman & Mradison, 2021).

Selain ketegangan ideologi, ketidakstabilan ekonomi pasca-kemerdekaan juga memperburuk situasi politik di Indonesia. Setelah Proklamasi 1945, Indonesia mewarisi

kondisi ekonomi yang hancur akibat eksploitasi kolonial dan kerusakan selama masa perang. Menurut data Bank Indonesia, inflasi pada akhir 1940-an mencapai lebih dari 600%, terutama karena kelangkaan barang, distribusi yang tidak merata, dan kebijakan moneter yang belum stabil. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya untuk membiayai pembangunan dan membayar utang luar negeri yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Ketidakstabilan ekonomi ini memengaruhi kehidupan masyarakat, seperti kelangkaan bahan pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan pengangguran yang tinggi. Ketegangan sosial meningkat, dengan protes dan pemberontakan yang muncul di berbagai daerah, seperti DI/TII di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan, yang sebagian besar dipicu oleh kekecewaan terhadap pemerintahan pusat. Ketidakpuasan ini memberikan celah bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti PKI dan kelompok agama, untuk memperkuat basis dukungan mereka, yang semakin memperuncing ketegangan politik (Muhajir, 2016).

Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia, seperti DI/TII, PRRI/Permesta, dan pemberontakan PKI di Madiun, merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah yang timbul karena berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi (Maulida, 2018). Pemberontakan ini mencerminkan ketegangan antara kelompok-kelompok tertentu dengan pemerintah pusat, yang dianggap tidak mampu memberikan keadilan atau memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang merasa terpinggirkan (Anderson, 2013).

Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dimulai pada tahun 1949, dipimpin oleh Kartosuwiryo yang menuntut penerapan negara Islam di Indonesia. Kelompok ini berupaya untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia dan mendirikan negara Islam Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. DI/TII memanfaatkan ketidakpuasan lokal terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak

memperhatikan aspirasi daerah dan agama.⁹ Pemberontakan ini bertahan cukup lama, meskipun pada akhirnya dapat ditekan pada awal 1960-an dengan berbagai operasi militer. Data dari Sejarah Militer Indonesia menunjukkan bahwa DI/TII mengorganisir pemberontakan yang melibatkan ribuan pasukan gerilya, dan meskipun pemberontakan ini berhasil dihentikan, dampaknya terhadap stabilitas politik Indonesia cukup besar.

Sementara itu, pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi pada tahun 1958 juga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam hal distribusi pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. PRRI/Permesta dimulai di Sumatera dan Sulawesi, di mana para pemimpin daerah merasa tidak diberi perhatian yang cukup oleh pemerintah pusat, serta terpinggirkan dalam hal alokasi dana pembangunan dan distribusi kekuasaan. Para pemimpin daerah ini mendeklarasikan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan tujuan memperjuangkan otonomi daerah yang lebih luas. Data dari Sejarah Pergerakan Indonesia menyebutkan bahwa PRRI/Permesta sempat menguasai sebagian wilayah Sumatera dan Sulawesi selama beberapa bulan, meskipun akhirnya dapat ditumpas oleh tentara nasional Indonesia.

Pemberontakan PKI 1948 di Madiun juga merupakan salah satu pemberontakan besar yang dipicu oleh ketegangan ideologi di Indonesia. Pada tahun 1948, PKI yang memiliki pengaruh kuat di kalangan buruh dan petani, melancarkan pemberontakan di Madiun dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan mendirikan negara komunis. Pemberontakan ini terjadi di tengah-tengah ketidakpastian pasca-kemerdekaan, dengan kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Pemberontakan PKI ini dapat ditekan setelah pertempuran sengit dengan pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal A.H. Nasution. Menurut data dari Sejarah Pemberontakan PKI di Madiun, ribuan orang tewas dalam pertempuran ini, dan pasca-

pemberontakan, PKI semakin dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah.

Secara keseluruhan, ketiga pemberontakan ini menggambarkan ketidakstabilan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dengan latar belakang ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak cukup responsif terhadap kebutuhan daerah dan ketegangan ideologis yang muncul di kalangan kelompok politik yang berbeda. Pemberontakan-pemberontakan ini tidak hanya mengguncang stabilitas politik, tetapi juga menambah tantangan besar bagi pemerintah Indonesia yang sedang berusaha membangun negara yang baru merdeka (Syahrul, 2020).

Respon militer terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia selama masa transisi pasca-kemerdekaan, khususnya pada era Orde Lama, ditandai dengan serangkaian operasi militer yang bertujuan untuk meredam pemberontakan dan menjaga stabilitas nasional. Dalam menghadapi berbagai pemberontakan, seperti DI/TII, PRRI, dan pemberontakan PKI di Madiun, militer memainkan peran utama dalam memulihkan ketertiban. Salah satu contoh paling mencolok adalah operasi militer yang dilakukan oleh TNI untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Aceh pada tahun 1950-an.¹¹ Dalam operasi ini, militer menggunakan pendekatan kekerasan yang intens untuk menghentikan perlawanan kelompok bersenjata. Menurut data dari Sejarah Militer Indonesia oleh Alwi Shihab, operasi militer tersebut berhasil mengalahkan gerakan-gerakan tersebut meskipun menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak.

Pendekatan keras yang digunakan militer dalam meredam pemberontakan juga tercermin dalam cara militer menangani protes sosial dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Militer seringkali dipanggil untuk menangani ketegangan sosial yang berujung pada kerusuhan atau perlawanan bersenjata. Misalnya, dalam menanggapi pemberontakan PRRI di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1958, militer menerapkan taktik agresif untuk memulihkan kontrol terhadap daerah-daerah

yang dikuasai pemberontak. Militer Indonesia menggunakan strategi blokade dan serangan udara, yang menurut laporan Sejarah Pergerakan Indonesia pada masa itu, berhasil mengakhiri dominasi PRRI di beberapa wilayah, meskipun dampaknya cukup besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Rikan, 2015).

Selain operasi militer, keterlibatan militer dalam urusan sipil, termasuk ekonomi, juga semakin menguat pada masa Orde Baru. Dalam konteks ini, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga turut campur dalam pembuatan kebijakan ekonomi, termasuk distribusi sumber daya dan pengelolaan sektor-sektor penting seperti pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kelangsungan pembangunan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Data dari laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 30% dari proyek-proyek pembangunan pada tahun 1960-an dan 1970-an melibatkan keterlibatan TNI, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyelenggaraannya (Hilal, Hendra, Legionosuko, & Risman, 2022).

Secara keseluruhan, respon militer terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia pada masa Orde Lama menunjukkan bagaimana militer tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga mengambil alih fungsi-fungsi pemerintahan sipil, termasuk dalam bidang ekonomi dan kebijakan sosial. Pendekatan keras ini, meskipun berhasil mengendalikan pemberontakan dan ketegangan, juga mengurangi ruang bagi kebebasan sipil dan demokrasi, yang menjadi salah satu dampak negatif dari dominasi militer dalam pemerintahan.

Transisi Kekuasaan dan Dominasi Militer dalam Politik Pasca-Kondisi Darurat

Masa revolusi fisik di Indonesia, yang berlangsung antara tahun 1945 hingga 1949, merupakan periode krusial dalam sejarah bangsa yang ditandai oleh upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali

oleh Belanda. Dalam situasi ini, militer memainkan peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia. Perlawanan terhadap pasukan Belanda, yang dikenal dengan Agresi Militer I (1947) dan Agresi Militer II (1948), menunjukkan betapa militer Indonesia menjadi tulang punggung perjuangan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan negara (Nazara & Subaryana, 2022).

Salah satu strategi militer yang signifikan pada masa ini adalah perang gerilya, yang dipopulerkan oleh Jenderal Soedirman. Dengan taktik gerilya, pasukan Indonesia mampu memanfaatkan keunggulan geografis untuk melawan pasukan Belanda yang lebih unggul secara persenjataan dan logistik. Strategi ini melibatkan mobilisasi masyarakat lokal untuk mendukung perjuangan, baik secara langsung dalam pertempuran maupun melalui penyediaan logistik.¹² Data dari laporan Sejarah TNI menyebutkan bahwa gerilya yang dilakukan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, terutama setelah ibu kota Republik jatuh pada tahun 1948, berhasil membuat Belanda kesulitan mempertahankan daerah yang mereka kuasai.

Selain itu, militer juga berperan dalam mempertahankan jalannya pemerintahan Indonesia di masa-masa sulit. Ketika Yogyakarta sebagai ibu kota Republik jatuh ke tangan Belanda dalam Agresi Militer II, pimpinan militer bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan darurat. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara di Bukittinggi menjadi contoh bagaimana militer dan pemerintah sipil berkolaborasi untuk menjaga legitimasi Indonesia di mata dunia.

Dari perspektif sosial, militer juga menjadi simbol perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Banyak masyarakat yang secara sukarela bergabung dalam laskar-laskar perjuangan yang berafiliasi dengan TNI, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan laskar rakyat. Laskar ini memberikan kontribusi besar dalam pertempuran melawan penjajah, terutama di tingkat lokal. Menurut data

Kementerian Pertahanan, jumlah anggota laskar rakyat pada masa revolusi fisik mencapai lebih dari 100.000 orang, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, masa ini juga diwarnai oleh berbagai tantangan, seperti kurangnya persenjataan, koordinasi yang lemah antara pasukan reguler dan laskar, serta konflik internal di tubuh militer sendiri. Namun, tekad dan semangat mempertahankan kemerdekaan tetap menjadi faktor utama yang memungkinkan Indonesia bertahan selama masa darurat perang ini. Secara keseluruhan, peran militer dalam revolusi fisik 1945-1949 tidak hanya terbatas pada medan perang, tetapi juga mencakup aspek politik dan sosial yang lebih luas. Militer menjadi aktor kunci dalam menjaga kedaulatan Indonesia dan memastikan keberlanjutan perjuangan hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949.

Pada periode 1945–1965, Indonesia mengalami masa-masa penuh gejolak yang memengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi negara. Salah satu isu penting yang muncul dalam periode ini adalah bagaimana militer terlibat secara aktif dalam merespons berbagai pemberontakan dan ketegangan sosial, sekaligus menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas nasional. Militer, sebagai institusi yang baru terbentuk pasca-kemerdekaan, menghadapi tantangan besar, termasuk dalam menangani pemberontakan berskala besar seperti DI/TII, PRRI/Permesta, dan pemberontakan PKI Madiun.

Latar belakang munculnya pemberontakan ini sebagian besar dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil, seperti pembagian sumber daya dan ketegangan ideologi yang terjadi di tingkat nasional. Contohnya, DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, didorong oleh keinginan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Sementara itu, PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) muncul sebagai bentuk protes daerah terhadap

kebijakan sentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Data dari Sejarah Nasional Indonesia menyebutkan bahwa pada puncaknya, pemberontakan DI/TII melibatkan sekitar 15.000 anggota bersenjata di Jawa Barat, sementara PRRI/Permesta menguasai beberapa wilayah strategis di Sumatra dan Sulawesi.

Respon militer terhadap kondisi ini menunjukkan pendekatan yang tegas dan sering kali menggunakan kekuatan besar. Pada masa itu, militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi alat politik pemerintah pusat untuk mempertahankan integritas negara. Operasi militer dilakukan di berbagai wilayah untuk menumpas pemberontakan, seperti Operasi Tegas untuk mengatasi DI/TII di Jawa Barat dan Operasi Saptamarga untuk menghadapi PRRI di Sumatra. Strategi militer ini melibatkan penggunaan pasukan bersenjata dalam skala besar, blokade wilayah, dan penindakan langsung terhadap kelompok pemberontak. Meskipun efektif dalam meredam pemberontakan, operasi militer ini juga menimbulkan dampak sosial yang besar, seperti pengungsian warga sipil dan kerusakan infrastruktur.

Di sisi lain, militer juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah kondisi ekonomi yang kacau. Inflasi yang tinggi, kurangnya pasokan pangan, dan ketidakstabilan harga menjadi tantangan besar bagi pemerintah Orde Lama. Dalam konteks ini, militer sering kali terlibat langsung dalam pengelolaan distribusi bahan pokok, bahkan menjadi bagian dari solusi sementara untuk mengatasi krisis ekonomi.

Selain itu, isu kudeta militer terhadap Soekarno juga menjadi bagian dari dinamika politik pada periode ini. Ketegangan antara militer dan Presiden Soekarno semakin meningkat, terutama ketika militer merasa bahwa kebijakan politik Soekarno, seperti dukungannya terhadap PKI (Partai Komunis Indonesia), berpotensi mengancam stabilitas nasional. Konflik ini mencapai puncaknya setelah insiden G30S pada tahun 1965, yang berujung pada peralihan kekuasaan dari

Soekarno ke Soeharto dan awal mula Orde Baru (Henry, Perdana, & Yustina, 2020). Secara keseluruhan, periode 1945–1965 merupakan masa penting dalam sejarah Indonesia di mana militer bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan negara, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam politik dan ekonomi. Meskipun kontribusi militer dalam menjaga keutuhan negara tidak dapat disangkal, pendekatan yang mereka ambil sering kali menimbulkan dampak negatif, baik bagi masyarakat sipil maupun stabilitas jangka panjang negara.

Dekade 1960-an di Indonesia merupakan periode penuh gejolak yang ditandai oleh meningkatnya konflik internal yang melibatkan berbagai elemen politik, termasuk pengaruh kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁶ Pada masa ini, PKI menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia dengan dukungan luas dari petani, buruh, dan sebagian intelektual. PKI memanfaatkan situasi sosial-ekonomi yang sulit, seperti tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, untuk memperluas basis dukungannya. Berdasarkan data dari Sejarah Nasional Indonesia, PKI pada awal 1960-an mengklaim memiliki lebih dari tiga juta anggota resmi, menjadikannya salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok (Bourchier & Hadiz, 2014).

Pengaruh PKI yang semakin kuat memicu kekhawatiran di kalangan militer dan kelompok anti-komunis lainnya. Hal ini diperparah oleh dukungan Presiden Soekarno terhadap PKI, terutama dalam ideologi "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang bertujuan untuk menyatukan semua kekuatan politik di bawah satu visi. Dukungan ini menciptakan ketegangan di tubuh militer, yang melihat PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan ideologi negara, yakni Pancasila.

Salah satu puncak dari konflik ini adalah persaingan antara militer dan PKI dalam meraih pengaruh di pemerintahan dan masyarakat. PKI sering kali mendorong program-program reformasi agraria yang kontroversial, seperti Land Reform, yang melibatkan redistribusi tanah dari tuan tanah besar kepada petani kecil.

Namun, program ini menimbulkan konflik sosial di pedesaan, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana bentrokan antara pendukung PKI dan kelompok masyarakat lainnya sering terjadi. Data dari laporan *History of Indonesian Communism* mencatat bahwa pada tahun 1964, terjadi lebih dari 1.000 insiden konflik terkait reformasi agraria yang melibatkan kekerasan fisik.

Ketegangan ini akhirnya memuncak pada insiden Gerakan 30 September 1965 (G30S), di mana sekelompok perwira militer diculik dan dibunuh. Peristiwa ini dituduhkan kepada PKI, meskipun hingga kini keterlibatan langsung PKI dalam insiden tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Respons terhadap insiden ini adalah operasi militer besar-besaran yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yang kemudian memulai kampanye anti-komunis di seluruh Indonesia. Dalam operasi tersebut, diperkirakan antara 500.000 hingga satu juta orang yang diduga terlibat dengan PKI dibunuh, dan ratusan ribu lainnya ditahan tanpa proses hukum (Rikan, 2015).

Secara keseluruhan, dekade 1960-an menandai eskalasi konflik internal di Indonesia yang dipicu oleh perbedaan ideologi antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Pengaruh PKI yang kuat pada masa ini tidak hanya menciptakan dinamika politik yang kompleks tetapi juga meninggalkan jejak mendalam berupa tragedi kemanusiaan yang berdampak pada kehidupan sosial-politik bangsa hingga puluhan tahun setelahnya.

Ketegangan antara Presiden Soekarno dan militer menjadi salah satu dinamika politik paling penting di Indonesia pasca-insiden Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Sebelum peristiwa tersebut, hubungan antara Soekarno dan militer sebenarnya sudah mulai renggang, terutama karena kebijakan politik Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Soekarno mendorong implementasi ideologi "Nasakom" (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai upaya menciptakan keseimbangan politik, namun pendekatan ini justru memicu kekhawatiran di kalangan militer yang melihat

PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan ideologi Pancasila (Setyahadi, 2018).

Setelah insiden G30S, situasi semakin memanas. Kudeta yang dituduhkan kepada PKI menyebabkan militer, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, mengambil alih kendali keamanan dan memulai operasi pemberantasan terhadap pengaruh PKI di seluruh Indonesia. Data dari Amnesty International memperkirakan bahwa antara 500.000 hingga satu juta orang yang diduga terlibat dengan PKI tewas dalam kampanye ini, sementara ratusan ribu lainnya ditahan tanpa melalui proses hukum yang jelas. Keberhasilan militer dalam mengendalikan situasi ini meningkatkan posisi politik mereka secara signifikan, sehingga menciptakan dualisme kekuasaan antara Soekarno sebagai presiden dan militer yang semakin dominan.¹⁹

Pada saat yang sama, Soekarno berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan terus menggalang dukungan dari kelompok pendukung setianya, termasuk PKI yang meskipun sudah dilemahkan, masih memiliki pengaruh di beberapa daerah. Namun, posisi Soekarno semakin sulit ketika militer secara aktif membatasi ruang gerakannya. Salah satu langkah penting militer adalah menyingkirkan para loyalis Soekarno di pemerintahan dan membentuk kekuatan baru yang lebih memihak kepada Jenderal Soeharto (Rikan, 2015).

Ketegangan ini mencapai puncaknya pada 11 Maret 1966, ketika Soekarno dipaksa untuk mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dokumen ini memberikan kewenangan penuh kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan stabilitas. Meskipun Supersemar awalnya disebut sebagai langkah sementara, dalam praktiknya dokumen ini menjadi dasar bagi Soeharto untuk secara de facto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Pada 12 Maret 1967, Soekarno resmi dilengserkan oleh MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), dan Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden (Murtianto, 2022).

Periode ini mencerminkan pergeseran besar dalam politik Indonesia, di mana militer

tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam transisi kekuasaan. Hubungan Soekarno dan militer yang awalnya kooperatif berubah menjadi konflik terbuka yang berakhir dengan kejatuhan Soekarno. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Lama dan menjadi awal dari era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, yang didominasi oleh kekuatan militer dan sentralisasi kekuasaan.

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah politik Indonesia, karena menjadi tonggak peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Dokumen ini diterbitkan pada 11 Maret 1966 di tengah situasi politik dan keamanan yang sangat tidak stabil pasca-insiden G30S/PKI. Supersemar memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah strategis demi memulihkan keamanan negara. Namun, dokumen ini sering dipandang sebagai titik awal pengalihan kekuasaan yang mengarah pada berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru (Cribb & Kahin, 2004).

Militer memainkan peran penting dalam mendukung dan memanfaatkan Supersemar. Pada saat itu, situasi politik nasional sangat tegang dengan meningkatnya desakan untuk membubarkan PKI dan menstabilkan kondisi negara. Militer, yang dipimpin oleh Soeharto, menggunakan Supersemar untuk mengambil tindakan tegas, termasuk membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, hanya sehari setelah dokumen tersebut dikeluarkan. Tindakan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang merasa terancam oleh keberadaan PKI pasca-G30S.

Dukungan militer terhadap Supersemar tidak hanya terlihat dalam eksekusi kebijakan, tetapi juga dalam upaya memperkuat posisi Soeharto sebagai pemimpin *de facto*. Militer memobilisasi kekuatannya untuk memastikan pelaksanaan Supersemar, sekaligus menekan loyalis Soekarno yang mencoba menentang langkah ini. Data dari arsip sejarah MPRS menunjukkan bahwa pada tahun 1967, militer berhasil mendorong sidang istimewa MPRS

untuk mencabut kekuasaan Soekarno sebagai presiden, sehingga mengukuhkan Soeharto sebagai penjabat presiden.

Namun, keberadaan Supersemar sendiri hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, terutama karena dokumen aslinya tidak pernah ditemukan. Beberapa pihak menduga bahwa penyerahan Supersemar dilakukan di bawah tekanan militer. Meski begitu, militer tetap memainkan peran utama dalam menggunakan dokumen ini untuk melegitimasi transisi kekuasaan. Dalam konteks politik, dukungan militer terhadap Supersemar menunjukkan bagaimana institusi ini tidak hanya menjadi alat pertahanan negara, tetapi juga aktor politik yang menentukan arah pemerintahan. Peran militer dalam mendukung Soeharto melalui Supersemar menandai awal dominasi militer dalam politik Indonesia selama era Orde Baru, di mana kekuatan militer digunakan sebagai pilar utama stabilitas politik dan pengendalian pemerintahan (Anderson, 1983).

SIMPULAN

Indonesia selama Orde Lama sebagai respons terhadap berbagai krisis nasional yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh pemerintahan sipil. Militer menjadi lebih aktif dalam politik sebagai akibat dari situasi darurat seperti pemberontakan yang meluas di berbagai wilayah, penurunan kondisi sosial-ekonomi, dan ketegangan ideologis antara nasionalis, komunis, dan agama. Militer tidak hanya melakukan tugas pertahanan negara tetapi juga mulai terlibat dalam pengambilan keputusan politik untuk menjaga stabilitas negara. Dengan menggunakan kondisi darurat sebagai dasar keterlibatan, militer secara bertahap membangun dominasi dalam politik Indonesia, suatu warisan yang terus berdampak hingga masa setelah Orde Baru. Sebaliknya, masalah tentang keterlibatan militer dalam menggulingkan Soekarno menunjukkan hubungan yang kompleks antara kekuasaan sipil dan militer. Ketegangan ini meningkat setelah Gerakan 30 September 1965, yang memaksa militer di bawah pimpinan Jenderal Soeharto mengambil alih keamanan. Semakin banyak

dukungan masyarakat terhadap militer, yang dianggap menyelamatkan negara dari ancaman komunisme, memperkuat legitimasi politik militer. Terakhir, militer memainkan peran penting dalam pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, yang dimulai dengan Surat Perintah Sebelas Maret, juga dikenal sebagai Supersemar, pada tahun 1966. Peran militer selama periode ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga berperan sebagai aktor politik yang menentukan bagaimana pemerintahan akan berjalan. Militer secara bertahap mengambil alih politik Indonesia dengan menggunakan kondisi darurat sebagai dasar keterlibatan. Dominasi ini bertahan hingga masa setelah Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourchier, D., & Hadiz, V. (2014). *Indonesian politics and society: A reader*. Routledge.
- Fattah, A. (2005). *Demilitarisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. LKiS Pelangi Aksara.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Suharto*. Penerbit Kompas.
- Waris, I. *Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia: Masa Awal Kemerdekaan Hingga Masa Orde Baru*. wawasan Ilmu.
- Abdi, R. N., Wijayanto, J., & Midhio, I. W. (2020). Aspek Diplomasi, Strategi Pertahanan Semesta, dan Irregular Warfare dalam Penanganan Gerakan Disintegrasi di Indonesia. *Mimbar Agama Budaya*, 37(1), 8-12.
- Alam, M. B. S. *Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Terhadap Indonesia Pada Masa Perang Dingin 1945-1958*.
- Anderson, D. C. (2013). *Kudeta Madiun 1948*. MediaPressindo.
- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23-46.
- Hariyanto, E. Peran politik militer (ABRI) orde baru terhadap depolitisasi politik Islam di Indonesia: Studi hegemoni politik militer orde baru terhadap politik Islam tahun 1967-1990.
- Henry, S., Yusuf Perdana, Y. P., & Yustina, S. E. (2022). Dwifungsi Abri Dalam Sosial Politik Sebagai Gerakan Akar Rumput Pada Masa Orde Baru. *Krakatoa: Journal of History, History Education, and Cultural Studies*, 1(1), 1-4.
- Hilal, S., Hendra, A., Legionosuko, T., & Risman, H. (2022). Pasang Surut Hubungan Sipil Militer Di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3549-3550.
- Maulida, F. H. (2018). Hitam Putih Pri-Permesta: Konvergensi Dua Kepentinganberbeda. *Paradigma*, 8(2), 174-185.
- McGregor, K. Abangan, nominal Muslim, especially in Java ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Armed Forces of the Republic of Indonesia), former name for the Armed Forces, now called the TNI (Tentara Nasional Indonesia) AGO (Attorney General's Office). *The Indonesian Genocide Of 1965*, 367.
- Murtianto, T. B. (2022). *Surat Perintah Sebelas Maret: Suatu Kajian Historis-Yuridis* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Nisvi, D. S., Fandik, A., Aisy, I. R., & Rettob, S. (2022). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penghapusan Klausul Keturunan PKI Sebagai Syarat Masuk TNI. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 42-58.
- Prasetiadi, D. Z., Marjono, M., & Sumardi, S. (2021). Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1), 23-34.
- Rikan, K. (2015). *Konsep Dwifungsi ABRI Dan Perannya Dimasa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rizal, R. (2021). Peran jenderal soedirman dalam perang griliya (studi historis masa

- agresi militer belanda ii tahun 1948-1949 di jawa tengah). *Danadyaksa Historica*, 1(1), 12-24.
- Sahajuddin, S. (2019, September). Gerakan DI/TII Di Sulawesi Selatan Dalam Kajian Sumber Sejarah Lisan 1950-1965 (Di/Tii Movements In South Sulawesi The Study Oral History Sources Of 1950-1965). In *Seminar Series Social Sciences* (No. 1).
- Seran, A. (2015). Dua Versi Satu" Fakta" Sejarah? Hermeneutika Sebagai Acuan Kritik Ideologi Sejarah Orde Baru. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 2(02), 31-71.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Suharto*. Penerbit Kompas.
- Suryawan, I. P. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2020). Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 10(2).
- Tambunan, A. S. S., & Mukmin, H. (1984). *Pejuang dan prajurit: konsepsi dan implementasi dwifungsi ABRI*. Penerbit Sinar Harapan.
- Waris, I. *Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia: Masa Awal Kemerdekaan Hingga Masa Orde Baru*. wawasan Ilmu.